

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kepulauan banyak memiliki aset-aset pariwisata yang sudah dikenal luas dikalangan internasional dengan memiliki berbagai macam-macam kekayaan alam, suku bangsa, adat-istiadat dan budaya. Sehingga mempunyai keindahan alam tersendiri dari segi panorama pantai, hutan, pegunungan, bukit, sungai yang menjadikan sektor pariwisata Indonesia memiliki nilai lebih dan unik. Secara spesifik pariwisata di pandang salah satu sektor yang memperoleh pembangunan infrastruktur, membuka lapang pekerjaan, lapang usaha, dan dapat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), apabila dikelola secara efektif dan efisien. Menurut UU No 10 Tentang Kepariwisata, pasal 1 Pariwisata merupakan aneka ragam atraksi wisata yang didorong bermacam barang dan jasa yang di jual oleh para pihak bersangkutan dalam mengelola tersebut. Dalam hal ini pariwisata menjadikan obyek wisata yang diharapkan berdaya saing untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Hubungan pariwisata dengan aspek ekonomi bisa dibilang sebagai industri pariwisata, bila industri ada sebuah produk, seperti halnya disuatu industri ada pembeli, penawaran, dan permintaan maka produser memiliki tugas untuk membuat sebuah produksi supaya memuaskan pembeli. Dimaksud pembeli adalah seorang wisatawan yang memiliki kebutuhan khusus atau permintaan itu dengan sarana-prasarana, infrasturktur yang memadai, hal ini harus diimbangi dengan dukungan anggaran (Partadiredja, 1985)

Indonesia negara yang kaya akan potensi pariwisata tentu akan menjadi sorotan bagi dunia. Industry pariwisata harus diperhatikan secara khusus oleh pemerintah pusat dan daerah untuk memajukan potensi pariwisata. Sektor pariwisata merupakan sektor paling penting untuk berkontribusi pada pendapatan nasional, hal tersebut sektor pariwisata juga mampu membuat alternative bagi pembukaan lapangan kerja baru bagi masyarakat (Zaenuri, 2018). Pariwisata dikelola dengan melibatkan aktor atau stakeholder sebanyak mungkin dapat memberdayakan masyarakat dan meningkatkan perekonomian terutama di wilayah obyek wisata. Sektor pariwisata juga dapat memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian Indonesia, dan pembuatan Produk Domestik Bruto disektor pariwisata terjadi melalui penghasilan dari wisatawan nasional, wisatawan internasional, anggaran pariwisata, dan investasi pariwisata. Menurut (Kemenparekraf, 2019) devisa dari sektor pariwisata tahun 2018 mencapai 19, 29 miliar dolar AS, sehingga kontribusi terhadap produk domestik boruto pada tahun 2018 sebesar 4,5% dan meningkat menjadi 4,8% di tahun 2019. Peningkatan kontribusi dalam pariwisata didorong oleh jumlah kunjungan wisata mancanegara dan nusantara, serta investasi pada 10 destinasi prioritas. Hal ini dapat meningkatkan devisa Negara dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

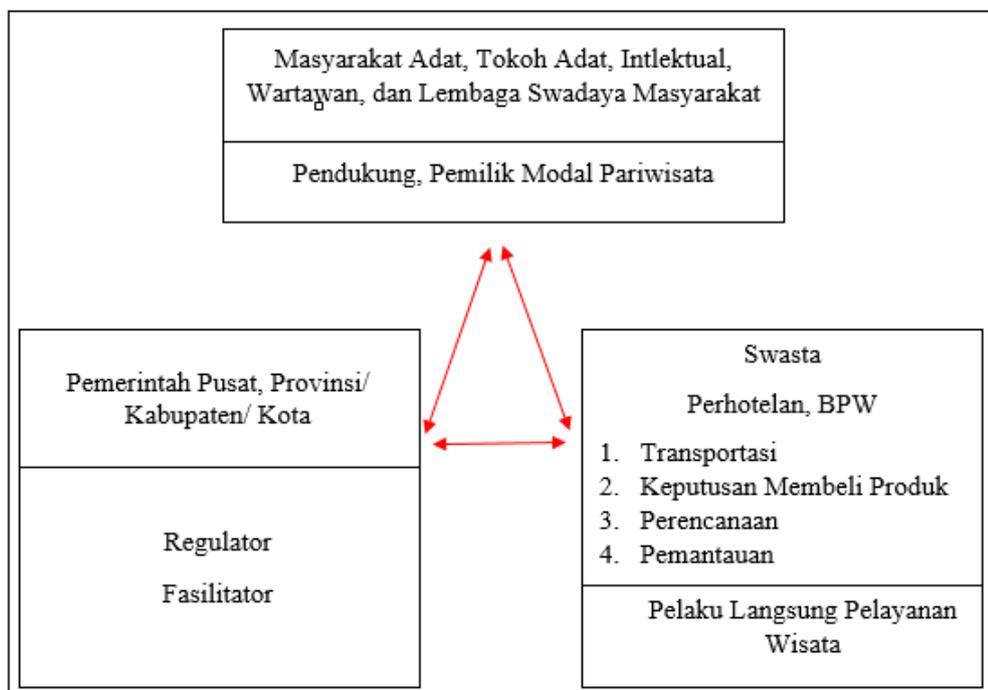
Pengelolaan industri pariwisata memiliki dampak positif dalam pengembangan daerah obyek wisata. Selaku sektor industry unggulan yang dapat meningkatkan perekonomian daerah dalam mengembangkan pariwisata, juga mampu meninggikan Pendapatan Asli Daerah. Pengembangan kepariwisataan mempunyai peran penting dalam aspek sosial budaya, ekonomi dan lingkungan.

Dalam aspek sosial budaya, sektor pariwisata berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi angka pengangguran, peningkatan perhatian seni, tradisi, dan budaya setempat. Dalam aspek ekonomi, pariwisata memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan luar negeri (devisa) sehingga dapat memperbaiki keseimbangan neraca dari kunjungan wisatawan manca Negara. Dalam aspek lingkungan, dapat menumbuhkan produk dan jasa wisata, meningkatkan usaha pemerintah melakukan konservasi terhadap lingkungan, memperbaiki manajemen lingkungan daerah pariwisata, melestarikan lingkungan, dan meningkatkan penyediaan infrastruktur baru (RPJM RI 2009-2014). Pengelolaan pariwisata pada awalnya banyak dikerjakan oleh pemerintah, namun dengan seiring keperluan masyarakat kepada penyajian pariwisata yang meningkat dan seketika kemampuan pemerintah yang terbatas, maka dari itu keterlibatan masyarakat dan swasta dalam penyajian pariwisata merupakan suatu kepercayaan (Zaenuri, 2018). Mengingat hal tersebut diperlukan kontribusi dari pihak-pihak yang berkompeten dibidangnya dalam menyerahkan fasilitas tersebut misalnya aktor masyarakat serta swasta (Pitana, 2005).

Keterkaitan internal swasta dan masyarakat dalam pengelolaan aplikasi pariwisata adalah bagian dari konsep *collaborative governance* yang berbentuk kolaborasi diantara ketiga stakeholder tersebut. Kolaborasi dengan mengaplikasikan paradigma visi bersama dan partisipasi, dengan cara untuk melaksanakan jalur koordinator dan kolaborasi pada bidang tata kelola pariwisata. Perlibatan pada pengelolaan pariwisata pihak swasta dan masyarakat juga merupakan penggunaan dari teori *paradigm new public governance* yang

berkembang pada ilmu administrasi public. Paradigma *governance* tersebut biasa digunakan sebagai alternatif upaya melaksanakan akselerasi (Ansell & Gash, 2007). Dalam hal tersebut lebih efisien untuk melakukan kolaborasi antara ketiga pilar *governance* tersebut yaitu, pemerintah, masyarakat, dan swasta. Konsep tentang pilar *governance* dalam sistem pariwisata bisa dilihat dalam gambar dibawah ini.

Gambar 1. 1 Aktor-aktor dalam sektor pariwisata



Sumber : Zaenuri, 2018

Dalam hubungan kemitraan diatas, masing-masing pihak mempunyai kontribusi yang bersifat khusus dan akan memperoleh manfaat secara bersama-sama, yaitu relasi pihak pemerintah dengan swasta, sehingga pemerintah dapat berkontribusi merumuskan suatu kebijakan atau regulasi dan *Memorandum of Understanding* (MoU), serta memfasilitasi pelayan perizinan, dan pengembangan

kolaborasi antara daerah yang menjadikan pelaku industri pariwisata dapat berinvestasi. Sedangkan pihak swasta akan membangkitkan kontribusi swasta untuk melakukan investasi karena telah memperoleh iklim yang kondusif atas peran pemerintah dalam memberikan kejelasan regulasi dan perizinan. Kemudian dalam kemitraan antara pemerintah dan masyarakat, hingga pemerintah membuat sebuah kebijakan yang berpihak pada masyarakat yang bersifat terbuka dan dipertanggung jawabkan. Hal ini dapat memberikan kesempatan kerja dan berusaha dalam bingkai kesetaraan dan keadilan dalam berkolaborasi. Secara umum para kalangan aktor pariwisata yang ada di kelompokan menjadi 3 bagian tersebut. Menurut (Zaenuri, 2018) dalam kategori kelompok pemerintah adalah bagian pusat, daerah serta desa yang berperan menjadi pengatur dan penyedia. Pihak swasta yang mencakup perhimpunan usaha pariwisata dan investor pariwisata sebagai aktor langsung pariwisata. Selanjutnya kelompok masyarakat adalah bagian dalam tokoh masyarakat, intelektual, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media informasi yang berperan dalam penunjang pariwisata.

Pengembangan ekonomi di wilayah Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus menimbang proses pengembangan ekonomi di kawasan strategis untuk perekonomian negara dan keselarasan dalam kemajuan daerah perlu adanya pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus. Dalam Undang-Undang tersebut ditindak lanjuti dengan (Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus), pada pasal 2 disebutkan bahwa penyelenggaraan meliputi, pengusulan, penetapan, pembangunan, pengelolaan, dan evaluasi. Kawasan

Ekonomi Khusus (KEK) merupakan kawasan wilayah hukum NKRI yang konsisten dalam melaksanakan peran perekonomian dan mendapatkan fasilitas memadai. Menurut (Kemenparekraf, 2016) Program pemerintah melalui kementerian pariwisata yang dikenal dengan 10 Bali baru, yaitu Brobudur (Jawa Tengah), Bromo-Tengger-Semeru (Jawa Timur), Danau Toba (Sumatera Utara), Kepulauan Seribu & Kota Tua (DKI Jakarta), Labuan Bajo (NTT), Mandalika (NTB), Tanjung Kalayang (Bangka Belitung), Tanjung Lesung (Banten), Morotai (Maluku), dan Wakatobi (Sulawesi Tenggara).

Menurut (Gunawan, 2017) dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, bahwa kebijakan ini berupaya menciptakan daerah kawasan yang memikat perhatian calon investor dan sebagai pendobrak ekonomi di wilayah tertinggal, yang berakibatkan belum adanya dorongan dan keringanan investasi. Berdasarkan hal tersebut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014, pada daerah Mandalika dapat meningkatkan aktivitas ekonomi yang bersifat sebagai startegis, baik itu perekonomian nasional maupun daerah, perlu di kembangkan dalam skala prioritas. Kemudian dalam penetapan KEK Mandalika PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yaitu sebagai pengusung dan melihat hal tersebut telah melengkapi, memenuhi standarisasi Kawasan Ekonomi Khusus). Kemudian Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 512 Tahun 2014 menetapkan badan penanaman modal dan pelayan perijinan terpadu sebagai Administrator. Pada tanggal 20 Oktober 2017 KEK Mandalika telah diresmikan oleh presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo, maka dengan hal tersebut siap beroperasi untuk melayani dan menerima investor (CNN Indoneisa,

2017), pengembangan ini di prioritaskan untuk pelaksanaan penunjang industri pariwisata dengan pembangunan pariwisata yang berorientasikan pada kelestarian nilai dan kualitas lingkungan hidup berada dimasyarakat (BUMN, 2017).

Dengan menawarkan obyek wisata bahari, KEK Mandalika memiliki panorama pemandangan yang memikat perhatian para pengunjung wisatawan. Nama Mandalika asal muasal dari putri Mandalika, pada legenda dahulu terkenal dengan berparas cantik jelita yang disayambarakan oleh pangeran-pangeran dari kerajaan untuk dinikahi, namun hal itu putri Mandalika tidak setuju, akhirnya ia meloncat ke lautan dan menjelma sebagai cacing laut. Sehingga setiap tahun sekali yang berada di Lombok Tengah terdapat ritual Bau Nyale yang berarti menangkap cacing laut, dengan perayaan tersebut merupakan adat budaya yang unik untuk dilihat dan dapat menarik perhatian para kunjungan wisatawan domestic maupun mancanegara. Sebagai destinasi wisata bahari dan budaya dengan pemandangan eksotis yang berada ditimur pulau Bali, pengembangan kawasan diperkirakan dapat menarik kunjungan 2 jutaan wisatawan mancanegara pertahun pada 2019. Harapannya KEK Mandalika dapat memulai sebuah perjalanan pariwisata yang akan dapat mengambil setiap keuntungan dari sektor pariwisata. Berdasarkan potensi dan keunggulan yang ada, dikelola oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dengan lahan seluas 1.035,67 Ha, pengembangan KEK Mandalika juga diperkirakan menarik investasi senilai 40 triliun Rupiah dan memperkejakan 587.000 tenaga kerja hingga tahun 2025 (KEK Mandalika, n.d.). Dalam hal tersebut

akan sangat membantu kehidupan perekonomian masyarakat NTB pada umumnya dalam pengembangan ekonomi mereka.

Pemerintah dalam Pengelolaan wisata bahari KEK Mandalika tidak bisa berdiri sendiri secara independen. Dalam masalah keterbatasan pemerintah mengelola pariwisata terkait sumber daya manusia, fasilitas, infrastuktur, dan lainnya maka diperlukan kerjasama dengan mengimplikasikan peran swasta dan masyarakat. Hubungan pemerintah dengan masyarakat dan swasta merupakan media strategis upaya mewujudkan kinerja pemerintah, artinya kegiatan-kegiatan pembangunan bukan hanya sekedar lingkup usaha yang aktif, melainkan masyarakat ikut berperan dalam memastikan keberhasilan pembangunan sehingga masyarakat bukan lagi dipandang sebagai obyek, namun menjadi subyek dari pembangunan di daerah (Tenri, 2016). Kerjasama dalam sektor pariwisata merupakan kolaborasi dengan berbagai stakeholder untuk saling membangun kepercayaan, kehormatan, sehingga memiliki kepentingan dan visi bersama dalam kepentingan yang ingin dicapai (Ansell & Gash, 2007). Hubungan kolaborasi dengan stakeholder juga menjadi variabel yang sangat penting dalam peran pemerintah mendorong partisipasi swasta dan masyarakat untuk saling bekerjasama. Dalam masalah pendanaan untuk pengelolaan KEK Mandalika pemerintah bisa berkolaborasi dengan pihak swasta dan tidak semata-mata bergantung pada anggaran negara, maka dari itu keterlibatan peran swasta sangat membantu bagi pengelolaan dan pengembangan KEK Mandalika tersebut.

Dalam pengelolaan KEK Mandalika terdapat berbagai permasalahan diantaranya yaitu masalah sengketa lahan yang terjadi di wilayah operasi

pembangunan sirkuit MotoGP. Di sisi lain, sesuai dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menyelidiki kasus sengketa lahan yang berada dioperasikan pembangunan terdapat 9 bidang tanah yang saat ini masih dalam sengketa. Dalam hal tersebut sangat mempengaruhi proses pembangunan sirkuit MotoGP. Pihak Komnas HAM berharap keputusan yang terkait sengketa lahan tersebut dapat di keluarkan paling lambat dua minggu setelah proses penyandingan data berjalan, sebab pengerjaan kontruksi yang sedang dilakukan oleh pihak PT. ITDC juga mengejar target pembangunan untuk ajang penggelaran MotoGP sebelum bulan Juni tahun 2021 yang akan mendatang. Berdasarkan hasil pemeriksaan survey lapangan, Komnas HAM menemukan juga tiga orang warga secara langsung, menurut keterangan dari warga yang bersangkutan tentang lahan tanah bernama Gema Lazuardi dinyatakan sah secara hukum melalui keputusan MA, kemudian untuk kasus lahan milik ibu Suhartini disebutkan sampai saat ini belum ada kejelasan tentang pembayaran lahan dari pihak ITDC, mengingat dalam pembayaran tersebut dilaksanakan dengan penunggu lahan tersebut, selanjutnya yaitu pertemuan dengan bapak Masrup juga sedemikian sama halnya dengan ibu Suhartini yang sampai saat ini belum ada kejelasan status seperti apa pembayarannya, karena kedua warga tersebut masih memegang bukti yang sah atas kepemilikan lahan tersebut yang telah diratakan untuk pengerjaan sirkuit MotoGP(kompas.com, 2020).

Sedangkan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengungkapkan permasalahan lainnya yang berada pada KEK Mandalika yaitu *pertama* karena ditemukan adanya persaingan antara pemimpin menjelang

pemilihan kepada daerah maupun pemilihan presiden tahun 2019 lalu, sehingga dalam proses pembangunan KEK Mandalika berpotensi menjadi alat politik oleh elit-elit politik untuk mencapai kepentingan sendiri. Sehingga menjadi penghambat pembangunan sirkuit MotoGP. Permasalahan *kedua* yaitu pada proses akuisisi dan kepemilikan lahan tanah yang banyak ditemukan, sehingga terjadinya sengketa lahan tanah yang berada pada operasi pembangunan sirkuit MotoGP. Lalu Permasalahan *Ketiga* yaitu terkait dengan tata kelola pemerintahan yang tidak sejalan dengan upaya kemajuan proses pembangunan KEK Mandalika. Pada posisi saat ini, administrator KEK Mandalika yang berada dibawah naungan Dewan Kawasan, seharusnya dipegang atau dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP). Karena dinas PM-PTSP ini cukup berperan sangat penting sebagai anggota Dewan Kawasan yang menjadi lembaga *superbody* dalam mengatur seluruh proses perizinan investasi dalam upaya pembangunan sirkuit MotoGP. Persoalan KEK Mandalika ini sebenarnya telah muncul pada bulan Juni tahun 2018 yang lalu. Pada saat itu dapat ditemukan permasalahan tentang realisasi investasi di Mandalika sampai akhir 2017 hanya mencapai Rp/ 428,6 M. angka tersebut jauh dibawah komitmen investasi dikawasan wisata yang besarnya Rp. 13,5 T dan juga masih belum setara dibandingkan dengan target investasi yang sebesar Rp. 28,6 T (Tempo.co, 2018).

Diperkuat dengan hasil literature review yang didapatkan dari berbagai jurnal penelitian, kebijakan-kebijakan pemerintah, dan buku yang membahas mengenai analisis *collaborative governance* dan pengelolaan kepariwisataan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa penelitian ini akan membahas secara detail sejauh mana

upaya yang dilakukan pemerintah dalam *collaborative governance* dengan pihak swasta dan masyarakat, dan peran masing-masing stakeholders yang ditemukan khususnya pada pengelolaan obyek wisata bahari wilayah Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah.

1.2. Rumusan Masalah

Dari hal-hal yang diuraikan dalam Latar Belakang Masalah Penelitian, maka Rumusan Masalah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu :

1. bagaimana proses terjadinya *collaborative governance* dalam pengelolaan wisata bahari yang berada di wilayah Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika di kabupaten Lombok Tengah?
2. apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan obyek wisata Bahari Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika di kabupaten Lombok Tengah?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui proses *collaborative governance* dalam peran masing-masing stakeholders serta faktor penghambat dan Pendukung dalam pengelolaan obyek wisata bahari wilayah Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika di kabupaten Lombok Tengah.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

- A. Untuk memahami kajian kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata.

- B. Untuk memahami proses *collaborative governance* beserta peran masing-masing stakeholders dalam pengelolaan wisata bahari wilayah Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika di kabupaten Lombok Tengah.
- C. Untuk dapat dijadikan sebagai bahan rujukan penelitian selanjutnya atau bahan srtudi pada program studi ilmu pemerintahan khususnya di bidang *Collaborative Governance*.

1.4.2. Manfaat Praktis

- A. Bagi Pemerintah menjadi acuan bagi pemerintah untuk melakukan konsep *collaborative governance*
- B. Bagi Masyarakat mengetahui informasi tentang pentingnya peran masyarakat yang telibat pada proses *collaborative governance* dalam pengelolaan wisata bahari wilayah Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika di kabupaten Lombok Tengah.

1.5. Tinjauan Pustaka

Bagian ini membuat uraian secara sistematis tentang hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan persoalan yang dikaji dalam penelitian. Sehingga kajian pustaka ini memiliki fungsi untuk menjelaskan gejala dan permasalahan apa saja yang akan diteliti. Adapun beberapa hasil studi empiris terdahulu yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain adalah penelitian yang dilakukan oleh (Aeni & Astuti, 2019), dengan judul “Collaborative Governance dalam pengelolaan kepariwistaan yang berkelanjutan (studi pada kasus kegiatanpesta rakyat simpedes tahun 2019 di kabupaten Pati)”. Dimana fokus hasil penelitian menunjukkan sinergitas pemerintah dan pihak BUMN dalam pelaksanaan

rencana startegis pengembangan pariwisata *sustainable development* di kabupaten pati, bahwa stakeholders yang terlibat adalah Bank BRI sebagai BUMN dan pemerintah daerah kabupaten Pati sebagai pengelola, dengan tujuan melibatkan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam agenda kegiatan Pesta Rakyat Simpedes upaya sebagai terobosan inovasi dalam pengembangan sektor pariwisata di kabupaten Pati. Kontribusi Bank BRI sebagai menunjang perekonomian yaitu menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat digarap swasta dan penyediaan lapangan pekerjaan di kabupaten pati. Kemudian kemitraan antara pemerintah daerah dengan swasta diharapkan memberikan dampak positif sehingga membawa manfaat bagi masyarakat Pati.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh (Ali, Amil, & Zulhadi, 2018) yang berjudul “implementasi kebijakan *collaborative governance* dalam tata kelola kawasan pariwisata pada badan promosi daerah kabupaten Lombok Utara”. Penelitian tersebut menunjukkan badan promosi pariwisata daerah (BPPD) mampu memberi kontribusi yang besar terhadap kemajuan sektor pariwisata di kabupaten Lombok Utara, hal tersebut dapat dilihat berdasarkan jumlah kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara yang menginap di hotel berbintang dan terus meningkat cepat pertahunnya. Dalam mempromosikan kepariwisataan BPPD menggunakan strategi melalui periklanan, penjualan langsung, dan pubisitas sehingga dapat menaikkan jumlah kunjungan wisatawan dari hotel, taman nasional gunung rinjani, air terjun tiu kelep, pantai seperti gili trawangan, gili meno, gili air, dan masih banyak pantai yang indah di kabupaten Lombok utara. Namun dalam implementasi

kebijakan *collaborative governance* penelitian ini belum adanya keterlibatan atau kerjasama dengan instansi yang bersangkutan dalam menunjang kepariwisataan.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh (Permadi, Darwini, Retnowati, & Wahyulina, 2019) berjudul “persepsi dan preferensi wisatawan muslim terhadap sarana dan prasarana wisata halal di Lombok (studi kasus Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika)”. Penelitian ini menjelaskan strategi untuk mengembangkan prasarana dan sarana untuk Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika dengan memfokuskan pada wisatawan muslim dengan cara menambah fasilitas akomodasi, transportasi, dan wisata halal. Pertama dalam memperbanyak pembangunan akomodasi penginapan seperti hotel, homestay, bungalows, dan villa dengan pembangunan harus memadai atau harus ada hotel berbintang kelas atas. Kedua yaitu transportasi yaitu menjadi akses perjalanan menuju Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika tersebut, agar para wisatawan mudah melakukan perjalanan. Ketiga memfokuskan pada makanan halal agar wisatawan muslim untuk tidak takut dalam memasuki restoran ketika mereka hendak singgah untuk makan. Keempat yaitu fasilitas yang harus disesuaikan dengan sarana wisata halal di KEK Mandalika, seperti memperbanyak tempat ibadah yang harus ada jarak terdekat dalam daerah tersebut.

Penelitian yang berjudul “analisis penerapan *collaborative governance* dalam pengelolaan pariwisata bencana lava tour”. Penelitian (Mirza, Universitas, & Mada, 2017) ini mencakup sebuah organisasi yang berlokasi di wilayah Yogyakarta yang merupakan rawan bencana alam gunung merapi. Aktor yang memiliki peran besar di dalam kolaborasi yang terjadi selama proses pengelolaan pariwisata bencana lava

tour merapi merupakan unit analisis yang digunakan. Hasil analisa dari aktor pemerintah dalam pengelolaan pariwisata tersebut, pemerintah tidak dapat menjalankan secara individu maka secara kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Yogyakarta dan kemudian diterapkan demi menunjang pariwisata bencana tersebut berkesinambungan dengan pemberdayaan masyarakat sekitar destinasi wisata. Pemerintah Yogyakarta telah banyak membuat kebijakan, salah satunya yaitu mengenai pembangunan wisata merapi tour terdapat dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan (RIPK) tahun 2012-2016 yang membahas pergolongan wisata, misalnya daerah rawan, daerah bahaya I, dan daerah bahaya II. Kegiatan lain yang dilakukan oleh pemerintah yaitu berupa mitigasi bencana, memberikan fasilitas diklat bagi swasta dan juga masyarakat dalam pengelolaan lava tour merapi tersebut.

Peran aktor swasta dalam kolaborasi lava tour merapi berkontribusi sebagai perantara antara wisatawan dan masyarakat. Melalui konsep menawarkan paket-paket atraksi wisata dan jasa penginapan, peran pihak swasta sangat berguna karena dalam hal ini dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan lava tour merapi pertahunnya. Selain itu travel tour juga bekerjasama dengan warga sekitar lereng merapi yang berkaitan dengan penginapan. Terakhir dari peran masyarakat salah satunya adalah sebagai usaha perdagangan di sekitar lava tour merapi, selain menjual makanan dan minuman, masyarakat juga menjual aksesoris cinderamata berciri khas Gunung Merapi. Jumlah pedagang sebanyak 70 orang yang berada di area parker pangukerejo, tugu ambruk, kali adem, batu allen dan tempat transit atraksi wisata jeep lainnya. Selain perdagangan kelompok masyarakat lokal juga

menyediakan jasa jeep dan motor trail, kemudian pada tahun 2015 terdapat 71 unit jeep wisata yang terbagi menjadi 3 paguyuban diantaranya yaitu paguyuban 86 merapi jeep tour community, paguyuban ginata, dan paguyuban land cruiser yang merupakan dikelola oleh kelompok warga setempat.

Penelitian menurut (Rabowo, Rief, & Utut, 2016) yang berjudul “analisis aspek pengelolaan kolaboratif di taman nasional laut kepulauan seribu (TNKpS). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tujuan dan sumberdaya yang dimiliki oleh stakeholders. Unit analisis yang digunakan dengan cara identifikasi kebijakan kesepakatan yang berlaku, analisis isi kebijakan, identifikasi persepsi dan peran pemangku kepentingan, analisis kualitatif terhadap persepsi dan peran pemangku kepentingan, analisis S.W.O.T, dan rekomendasi penyempurnaan kelembagaan kolaborasi Mitra Kutai. Bahwa dapat ditemukan dalam pengelolaan kolaborasi di TNK ternyata belum efektif, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah, yaitu pertama penelitian potensi dan kondisi terkini TNK, kedua publikasi hasil penelitian serta mengangkat isu permasalahan dan nilai penting TNK melalui media, ketiga pengutan jejaring kerja dengan lembaga donor internasional, keempat penetapan atau zonasi kawasan, kelima rekonfigurasi lembaga kolaborasi pengelolaan TNK serta penyusunan program dan skema pendanaan yang disepakati semua pihak, keenam kolaborasi dalam pembangunan model desa konservasi, dan ketujuh yaitu kolaborasi dalam program pemanfaatan kawasan ekonomi, seperti pembangunan kawasan agrowisata, taman safari, kawasan ekowisata dan pusat pendidikan,

Penelitian menurut (Umar, Burhanuddin, & Nasrulhaq, 2019) dengan judul “kolaborasi aktor dalam pembangunan pariwisata hutan mangrove tongke-tongke kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses kolaborasi yang terjadi dalam mencapai pembangunan secara efektif, transparansi, akuntabel, dan memenuhi kebutuhan public. Hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa dialog antar muka dalam pembangunan sudah berlangsung dengan baik akan tetapi belum intensif. Membangun kepercayaan terhadap semua aktor yang terkait, ditandai dengan keterbukaan para stakeholders dalam menyampaikan pendapat, informasi, dan saling membantu dalam menyelesaikan konflik terjadi. Komitmen pada proses, aktor yang terkait dalam pembangunan mampu konsisten dan bertanggung jawab terhadap tugas kewajibannya. Pemahaman bersama para aktor dalam pembangunan mampu memahami tugas dan tanggung jawab dengan tujuan menjadikan hutan mangrove tongke-tongke sebagai obyek wisata yang banyak dikunjungi, dan menambah perekonomian masyarakat. Kemudian yang terakhir dampak sementara yaitu mangrove yang sudah tumbuh subur di daerah tongke-tongke mampu membranding daerah sehingga banyak kunjungan wisatawan datang ke daerah tersebut.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh (Giat tri sambodo & ulung pribadi, 2016) dengan judul “pelaksanaan collaborative governance di desa budaya brodot, galur, kulonprogo, DI. Yogyakarta”. Kemudian hasil dari proses collaborative governance dalam bentuk *face to face dialog* dilaksanakan dengan arisan dan rapat di desa yang merupakan budaya yang sudah menjadi tradisi warga desa budaya Brosot. *Trust building* dilakukan dengan membangun komunikasi

dalam aktor yang terlibat di desa budaya, hubungan antar lembaga kemasyarakatan maupun lembaga pemerintah yang sangat mendukung upaya saling membangun kepercayaan. *Commitment to process* hasil keputusan arisan dan rapat biasanya diambil melalui musyawarah untuk mufakat, sehingga tidak ada yang merasa kalah atau menang. *Share understanding* pengertian dan pemahaman dilakukan oleh pemerintahan desa, pengurus desa budaya, dan elemen warga, yang telah mendirikan Radio Komunitas Swara Desa sebagai layanan informasi. *Intermediate outcome* hasil sementara yang mulai dikelola oleh warga, yaitu festival bentera upacara adat, mertu desa, dan workshop lainnya. Selanjutnya dalam *collaborative governance* di desa budaya Brosot secara detailnya dipengaruhi oleh *staring condition, institutional design, dan facilitative leadership*

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh (Irawan, 2016) yang berjudul “collaborative governance (studi deskriptif proses pemerintahan kolaboratif dalam pengendalian pencemaran udara dikota Surabaya)”. Hasil dari penelitian ini bahwa proses pemerintah dilaksanakan dengan tiga tahapan yaitu *identifying obstacles and opportunities, debating strategies for influence, dan planning collaborative action* yang menunjukkan kurangnya keterlibatan stakeholders lainnya di forum kerjasam, dan ketersediaan sumber anggaran masih minim. Pada ketiga tahapan tersebut hanya satu kriteria telah memenuhi syarat yaitu *trust among the participants*. Kemudian dalam implementasi pengendalian pencemaran udara dikota Surabaya juga menggunakan teori *good governance*, karena tidak efektifnya kinerja pemerintah sebagai pelaksana urusan public.

Penelitian yang berjudul “collaborative governance dalam perencanaan pembangunan: Partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam agenda kebijakan pembangunan perbatasan di kepri tahun 2015”. Dalam penelitian (Darmawan & Nazaki, 2015) terdapat hasil temuan lapangan, yaitu pertama kegiatan pembuatan kebijakan seperti forum musyawarah rencana pembangunan yang tidak secara umum dapat dihadiri oleh seluruh stakeholders terkait. Kedua masih kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan di masing-masing wilayah, khususnya di daerah kepulauan riau. Ketiga belum terlaksananya hubungan sinergitas antara pemerintah, swasta, LSM, masyarakat dan pemerintah daerah yang membuat terhambanya pembangunan daerah akan kegiatan politisasi dan korupsi. Kemudian inovasi yang dilaksanakan dalam upaya pembangunan masih belum menuju pada tingkat kebutuhan pembangunan secara umum seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi.

Selanjutnya penelitian yang berjudul “collaborative governance dalam pengelolaan bumdes di desa toapaya selatan kecamatan toapaya kabupaten bintan tahun 2018”. Hasil penelitian (Suryati, Afrizal, & Nazaki, 2018) menunjukkan bahwa *collaborative governance* dilaksanakan dengan LSM kelompok tani dalam pengelolaan BUMDes Mitra Karya Sejahtera yang bergerak dalam bidang produksi, perdagangan, pariwisata, jasa dan pelayanan. Ada juga Factor penghambat dalam pengelolaan tersebut dikarenakan BUMDes belum berani untuk melakukan kerjasama pada pihak sembarangan, dimana pihak BUMDes telah terjadi kecurangan dalam melaksanakan kolaborasi sebelumnya. Namun hasil kerjasama sudah terlaksana diantara pihak pemerintah desa, BUMDes Mitra Karya

Sejahtera dan kelompok tani yang berjalan mulus dengan tertera pada *Memorandum of Understanding* (MoU).

Tabel 1 1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang akan Diteliti

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kepariwisata Yang Berkelanjutan (Studi Pada Kegiatan Pesta Rakyat Simpedes Tahun 2019 Di Kabupaten Pati.	Tema penelitian yaitu membahas kerjasama antara pihak pemerintah dengan swasta dalam mengelola pariwisata.	Penelitian terdahulu lebih fokus menjelaskan kerjasama berbagai stakeholders pada pariwisata berkelanjutan di kegiatan pesta rakyat simpedes kabupaten Pati. Sementara dalam penelitian ini lebih fokus pada kolaborasi antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mengelola wisata bahari kawasan ekonomi khusus mandalika.
2.	Implementasi Kebijakan Collaborative Governance Dalam Tata Kelola Kawasan Pariwisata Pada Badan Promosi Daerah Kabupaten Lombok Utara.	Tema penelitian yaitu membahas kerjasama antara pihak pemerintah dengan swasta dalam mengelola pariwisata.	Penelitian terdahulu memfokuskan pada penjelasan kerjasama pengelolaan pariwisata yang dilakukan untuk mempromosikan destinasi wisata di kabupaten Lombok utara. Sementara dalam penelitian ini lebih fokus

			pada kolaborasi antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mengelola wisata bahari kawasan ekonomi khusus mandalika.
3.	Persepsi dan Preferensi Wisatawan Muslim Terhadap Sarana dan Prasarana Wisata Halal Di Lombok (Studi Kasus Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika).	Tema penelitian yaitu membahas mengenai Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.	Penelitian terdahulu menjelaskan persepsi terhadap wisatawan muslim dan membahas strategi dalam sarana dan prasarana wisata halal (<i>halal tourism</i>). Sementara dalam penelitian ini lebih fokus pada kolaborasi antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mengelola wisata bahari kawasan ekonomi khusus mandalika.
4.	Analisis Penerapan Collaborative Governance dalam Pengelolaan Pariwisata Bencana Lava Tour.	Tema penelitian yaitu membahas kerjasama antara pihak pemerintah dengan swasta dalam mengelola pariwisata.	Pada penelitian terdahulu membahas kerjasama dalam pengelolaan pariwisata bencana lava tour di area lereng gunung merapi kabupaten sleman dan destinasi wisata dikelola merupakan bekas

			letusan gunung merapi tahun 2010. Sementara dalam penelitian ini lebih fokus pada kolaborasi antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mengelola wisata bahari kawasan ekonomi khusus mandalika.
5.	Analisis Aspek Pengelolaan Kolaboratif di Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu (TNKpS).	Tema penelitian yaitu membahas kerjasama antara pihak pemerintah dengan swasta dalam mengelola pariwisata.	Penelitian terdahulu menjelaskan menganalisis kerjasama berbagai stakeholders dengan tujuan dan sumberdaya yang dimiliki di taman nasional laut kepulauan seribu. Sementara dalam penelitian ini lebih fokus pada kolaborasi antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mengelola wisata bahari kawasan ekonomi khusus mandalika.
6.	Kolaborasi Aktor Dalam Pembangunan Pariwisata Hutan Mangrove Tongke-	Tema penelitian yaitu membahas kerjasama antara pihak pemerintah	Penelitian terdahulu menjelaskan proses kolaborasi yang terjadi dalam mencapai

	Tongke Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.	dengan swasta dalam mengelola pariwisata.	pembangunan secara efektif, transparansi, akuntabel, dan memenuhi kebutuhan publik di pembangunan pariwisata hutan mangrove tongke-tongke. Sementara dalam penelitian ini lebih fokus pada kolaborasi antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mengelola wisata bahari kawasan ekonomi khusus mandalika.
7.	Pelaksanaan Collaborative Governance di Desa Budaya Brosot, Galur, Kulonprogo, DI. Yogyakarta.	Tema penelitian yaitu membahas kerjasama antara pihak pemerintah dengan swasta dalam mengelola pariwisata.	Dalam penelitian terdahulu menjelaskan proses pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan masyarakat desa brodot sebagai desa wisata berbasis budaya. Sementara dalam penelitian ini lebih fokus pada kolaborasi antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mengelola wisata bahari kawasan ekonomi khusus mandalika.

8.	Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya).	Tema penelitian yaitu membahas kerjasama antara pihak pemerintah dengan swasta.	Penelitian terdahulu menjelaskan kolaborasi pemerintah dalam pengendalian pencemaran udara di kota Surabaya dan bagaimana proses pengaplikasiannya untuk mengatasi masalah tersebut. Sementara dalam penelitian ini lebih fokus pada kolaborasi antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mengelola wisata bahari kawasan ekonomi khusus mandalika.
9.	Collaborative Governance Dalam Perencanaan Pembangunan: Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Dalam Agenda Kebijakan Pembangunan Perbatasan di Kepri Tahun 2015.	Tema penelitian yaitu membahas kerjasama antara pihak pemerintah dengan swasta.	Pada penelitian terdahulu menjelaskan kerjasama pemerintah dalam upaya pembangunan perbatasan di kepulauan riau tahun 2015 dengan melibatkan kontribusi masyarakat. Sementara dalam penelitian ini lebih fokus pada kolaborasi antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat

			dalam mengelola wisata bahari kawasan ekonomi khusus mandalika.
10.	Collaborative Governance Dalam Pengelolaan BUMDes di Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan Tahun 2018.	Tema penelitian yaitu membahas kerjasama antara pihak pemerintah dengan swasta.	Penelitian terdahulu lebih fokus membahas kolaborasi pemerintah pengelolaan BUMDes yang bergerak di LSM kelompok tani yang bergerak dalam bidang produksi untuk mengembangkan perekonomian desa toapaya selatan. Sementara dalam penelitian ini lebih fokus pada kolaborasi antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mengelola wisata bahari kawasan ekonomi khusus mandalika.

Berdasarkan kajian tinjauan pustaka di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu penelitian ini memiliki judul “collaborative governance dalam pengelolaan obyek wisata bahari wilayah kawasan ekonomi khusus mandalika dikabupaten Lombok tengah”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses collaborative governance dalam

peran masing-masing stakeholder serta untuk mengidentifikasi dan menganalisis factor-faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan obyek wisata wilayah KEK Mandalika. Indikator yang digunakan untuk mengetahui proses penelitian ini dapat dikategorikan sebagai praktek *collaborative governance* menggunakan hasil modifikasi dan elaborasi pendapat Ansell & Gash dan Emerson, Nabatchi & Balogh yaitu komunikasi, membangun kepercayaan & kesepahaman, legitimasi internal dan komitmen. Sedangkan dalam penelitian ini juga memiliki indikator untuk mengetahui factor penghambat dan pendukungnya yaitu untuk memperkuat hasil penelitian. Kolaborasi yang diteliti oleh beberapa stakeholders yaitu pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta memang ada kelebihan dan kekurangan, bahkan kendala masing-masing pihak yang berkaitan. Kesamaan penelitian terdahulu dan juga penelitian ini adalah sama-sama meneliti dengan fokus kajian *collaborative governance*. Namun perbedaan yang signifikan adalah kolaborasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah terkait dengan semua stakeholders yang berkaitan yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta yang lebih fokus pada kajian kepariwisataan.

1.6. Kerangka Dasar Teori

1.6.1. Collaborative Governance

Membahas mengenai *collaborative governance*, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu terkait dengan *governance*, karena istilah kata *governance* bagian dari konsep *collaborative governance*. Konsep dari *governance* lebih mengarahkan atau mengendalikan dalam bahasa latin klasik yang bermakna tindakan atau cara pandang mengatur, membimbing, dan mengarahkan. Sehingga *governance* merupakan praktek penyelenggaraan dan kekuasaan oleh pemerintah dalam mengelola urusan pemerintah secara umum dan pembangunan ekonomi pada

umunya (Widodo, 2001). Sementara *governance* sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara upaya melakukan penyediaan public good dan service.

Sedangkan kolaborasi merupakan istilah umum yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu pola hubungan kerja sama yang dilakukan lebih dari satu pihak. Emily R. mengungkapkan “*collaborative is the mutual engagement of participants in a coordinated effort to solve a problem together. Collaborative interaction are characterized by shared goals, symmerty of structure, and a hingh degree of negotiation, interacity, and interdependence* (Emily R. Lai, 2011).” Artinya dari penjelasan tersebut kolaboratif adalah kerja sama timbal balik dari para pihak dalam upaya terkoordinasi untuk memecahkan masalah bersama. Interaksi kolaboratif ditandai oleh tujuan bersama, simetri struktur dan pada tingkat negosiasi, intervitasy, dan saling ketergantungan. Pada intinya tujuan adanya kolaborasi adalah untuk memecahkan masalah bersama dengan tujuan yang sama dengan saling membantu antara satu pihak dengan lainnya.

Istilah dari *collaborative governance* merupakan suatu pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga-lembaga publik bersama dengan stakeholder yang berkaitan langsung dalam proses pengambilan keputusan secara bersama yang bersifat formal, berorientasi consensus, dan musyawarah dengan tujuan membuat atau melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program asset public (Ansell & Gash, 2007). Sedangkan instrumen yang digunakan untuk mengatasi suatu masalah, *collaborative governance* adalah kondisi yang dimana pemerintah untuk memenuhi tujuan public melalui kolaborasi antar kelompok maupun seseorang

(Richard J. Zeckhauser, n.d.). Kemudian Ansel & Gash menjelaskan model *collaborative governance* terdiri dari 4 variabel utama, yaitu :

1. Kondisi Awal

Kondisi yang hadir pada awal kerjasama dapat berupa memfasilitasi atau mencegah kolaborasi antara para aktor kepentingan, antara lembaga, pemegang saham. Stakeholder memiliki sejarah divisi pahit atas beberapa emosional masalah lokal menganggap sebagai musuh. Para pemangku kepentingan memiliki visi bersama yang ingin dicapai melalui kolaborasi dan sejarah masa lalu saling bekerjasama. Masalah yang dialami yaitu ketidakseimbangan sumber daya dari berbagai pemangku kepentingan berkolaborasi antara para pemegang peran.

2. Desain Kelembagaan

Seseorang pemimpin meminta para pemangku kepentingan untuk terlibat negosiasi yang baik dan mengeksplorasi, kompromi dan peroleh bersama. *Collaborative governance* sebagai consensus yang berorientasi meskipun menunjukkan bahwa consensus tidak terlalu tercapai. Masalah desain kelembagaan penggunaan tenggang waktu melemah merupakan sifat berkelanjutan kolaborasi secara tidak sengaja mengurangi insentif kerjasama yang berkelanjutan.

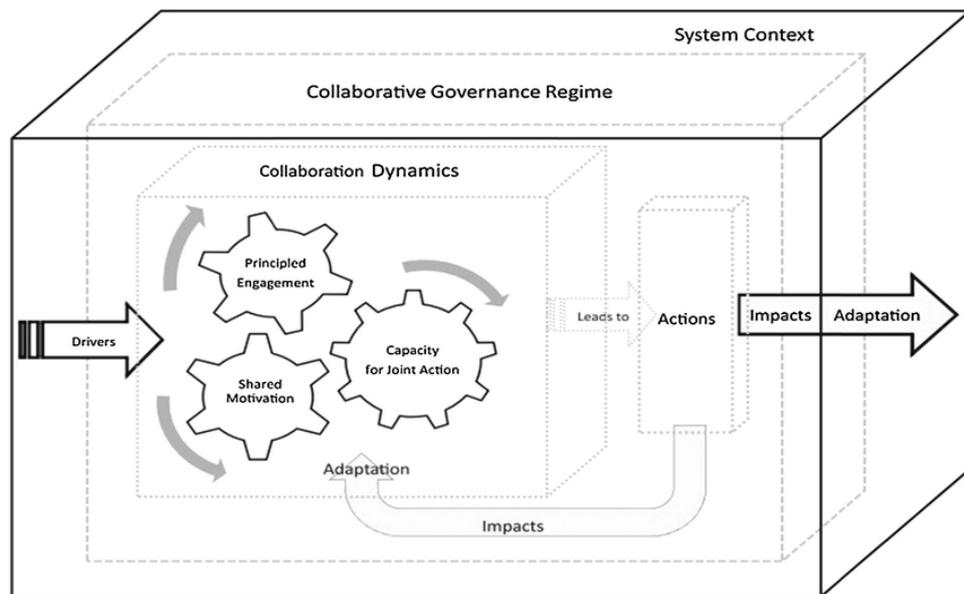
3. Kepemimpinan

Kepemimpinan penting untuk merangkul, memberdayakan dan melibatkan para pemangku kepentingan dan memobilisasi untuk kesuksesan kolaborasi. Konflik yang tinggi dan kepercayaan rendah mempunyai insentif untuk berpartisipasi maka *Collaborative governance* dapat meneruskan layanan perantara antara stakeholder yang menerima layanan.

4. Proses kolaboratif

Proses kolaboratif terdiri dari masalah pengaturan, arah pengaturan dan pelaksanaan. Model kolaborasi penting sebagai konteks perubahan, kolaborasi tergantung pencapaian siklus positif antara komunikasi, kepercayaan, komitmen, pemahaman karena komunikasi jantung dari kolaborasi.

Gambar 1. 2 Kerangka Kerja Collaborative Governance Regime



Sumber : Emerson, 2012

Dalam kerangka integrative yang di gambar tersebut sebagai mana terlihat dikotak keluar yang digambarkan garis utuh mewakili konteks sistem disekitarnya atau penyelenggaraan politik, ekonomi, hukum, sosial ekonomi, dan yang lainnya. Konteks sistem ini membuat peluang, batasan-batasan dan mempengaruhi dinamika kolaborasi dalam hal awal sampai seterusnya. Dalam kerangka kerja ini, CGR digambarkan oleh kotak ditengah dengan garis putus-putus dan berisi dinamika kolaboratif dan tindakan kolaboratif.yang akan membentuk kualitas secara

keseluruhan dan tingkatan pada sejumlah mana CGR di kembangkan maupun mampu berlangsung secara efektif. Dinamika kolaboratif terdiri dari tiga komponen interaktif yaitu keterlibatan berprinsip, motivasi bersama dan kapasitas untuk melakukan tindakan bersama. Kemudian tiga komponen tersebut merupakan bekerja sama dengan cara yang interaktif dan berulang untuk menghasilkan tindakan kolaboratif dan langkah-langkah yang diambil dalam rangka melakukan tujuan bersama dari CGR. Tindakan kolaboratif dalam CGR dapat berdampak internal dan eksternal dalam rezim; dengan demikian dalam gambar tersebut terlihat (yaitu ghasil dilapangan) dan adaptasi potensial (transformasi dari situasi yang kompleks atau masalah) baik dalam konteks sistem maupun pada CGR tersebut.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, kerangka kerja integrative menjelaskan istilah CGR untuk menunjukan sebuah sistem dimana kolaborasi antara batas yang dilakukan menunjukan mode kekuasaan yang menonjol untuk seorang pemimpin dalam membuat keputusan maupun melaksanakan aktivitas. Kemudian istilah penggunaan kata “rezim” di pakai untuk menunjukan pada modus tertentu atau sistem pengambilan keputusan public dimana kolaborasi lintas batas merupakan pola yang berlaku bagi prilaku dan aktivitas stakeholders. Sedangkan bentuk dan arah CGR pada pengembangan dari tingkatan berlangsung efektif yang dipengaruhi waktu ke waktu oleh dua komponenennya.

Proses dari suatu kolaborasi dilakukan dalam beberapa tahapan. Suatu tahapan model kolaborasi menjadi penting untuk diperhatikan sebagai strategi dalam aspek pengelolaan suatu urusan publik. Kemudian Ansel dan Gash meyakini bahwa proses *collaborative governance* dapat dilihat sebagai berikut:

a. *Face to face dialog*

Semua bentuk *collaborative governance* dibangun dari dialog secara langsung atau interaktif dari setiap stakeholder yang terlibat dalam membahas kepentingan bersama. *Collaborative governance* pada dasarnya berorientasikan proses, maka dialog secara langsung sangat penting dalam rangka mengidentifikasi peluang dan keuntungan bersama. Dialog secara langsung bukanlah sekedar merupakan negoisasi yang seadanya dan juga dialog secara langsung ini dapat meminimalisir kontadiksi dan *disrespect* dari stakeholder yang terlibat, sehingga stakeholder dapat bekerjasama sesuai dengan tujuan dan kebermanfaatan bersama.

b. *Trust building*

Rasa percaya antara stakeholder memang merupakan hal yang normal diawal proses kolaborasi. Kolaborasi memang bukan sekedar tentang negoisasi antara stakeholder, namun merupakan upaya untuk saling membangun kepercayaan dengan aktor yang terlibat. Membangun kepercayaan sangat perlu dilakukan segera mungkin ketika proses kolaborasi pertama dilaksanakan. Hal ini upaya agar para stakeholder tidak mengalami egosentral antar lembaga. Oleh karena itu dalam melakukan membangun kepercayaan, diperlukan pemimpin yang mampu menyadari akan pentingnya kolaborasi.

c. *Commitment to process*

Komitmen tentunya mempunyai relasi yang kuat dalam proses kolaborasi. Komitmen merupakan motivasi untuk berpartisipasi atau terlibat dalam

collaborative governance, komitmen yang kuat dari setiap stakeholder diperlukan untuk mencegah resiko dari proses kerjasama. Meskipun komitmen memang merupakan hal yang susah dalam kolaborasi, namun komitmen harus mampu bertanggung jawab dari stakeholder supaya memandang relasi yang dilakukan sebagai hal yang baru dan perlu dikembangkan.

d. *Share understanding*

Pada pembahasan yang sama dalam kolaborasi, stakeholder juga harus terlibat saling berbagi pemahaman atau informasi mengenai apa yang dapat mereka capai melalui kolaborasi yang akan dilaksanakan. Saling berbagi pemahaman ini dapat digambarkan sebagai visi, misi, tujuan bersama, ideologi yang sama, dan lain-lainnya. Sehingga dapat berimplikasi terhadap kesepakatan bersama untuk mengartikan suatu masalah.

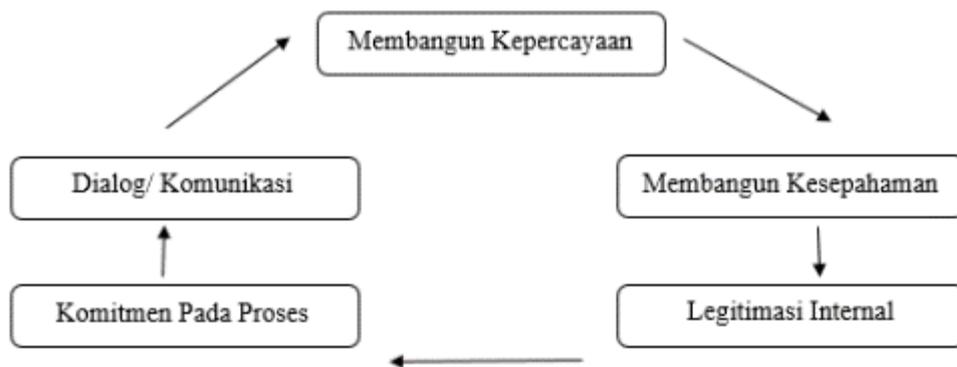
e. *Intermediate outcomes*

Hasil lanjutan dari proses kolaborasi terwujud dengan baik maka dalam bentuk output atau keluaran yang nyata. Hal ini merupakan hasil proses yang kritis dan menyatu dalam mengembangkan momentum yang dapat membimbing demi terwujudnya keberhasilan suatu kolaborasi. *Intermediate outcomes* ini akan muncul apabila tujuan yang mungkin dan memberikan keuntungan dari kerjasama yang mana secara relative konkrit.

Komponen proses kolaborasi terdiri dari dialog, membangun kepercayaan, komitmen untuk proses, pemahaman bersama dan outcomes (Ansell & Gash, 2007). Kemudian (Emerson, Nabatchi, & Balogh, 2012) mengemukakan bahwa komponen

proses kolaborasi terdiri dari keterlibatan yang berprinsip, motivasi bersama dan kapasitas untuk tindakan bersama. Adapun motivasi bersama terdiri dari komponen, yaitu kepercayaan bersama, pemahaman bersama, legitimasi internal dan komitmen bersama. Berikut dibawah ini merupakan gambar proses kolaborasi dari kombinasi dan elaborasi pendapat Ansell & Gash dan Emerson, Nabatchi & Balogh.

Gambar 1. 3 Proses Kolaborasi Antar Stakeholder (Collaborative Governance) Hasil Kombinasi dan Elaborasi



Sumber : diolah oleh Peneliti (2020)

Setiap proses kolaborasi pasti melakukan sebuah komunikasi dan dialog, Ansell dan Gash mengemukakan bahwa dialog merupakan inti proses untuk merobohkan hambatan lain dalam berkomunikasi antara para partisipan. Selain itu, dialog juga inti dari pada proses membangun kepercayaan, saling menghormati, membangun pemahaman. Menurut Emerson, Nabatchi dan Balogh kepercayaan merupakan aspek yang harus ada dalam jangka panjang pada proses kolaborasi. Proses membangun kepercayaan dilakukan sepanjang waktu selama partisipan bekerja sama. Antara partisipan saling mengetahui satu sama lain dan saling membuktikan bahwa mereka layak dapat diandalkan dalam mencapai tujuan

kolaborasi, dengan tumbuh dan berkembangnya kepercayaan dapat sebagai instrument untuk mengurangi biaya, meningkatkan investasi, dan stabilisasi relasi kerjasama.

Ansell dan Gash menjelaskan bahwa membangun kesepahaman dalam proses kolaborasi berarti bahwa partisipan setuju dan memahami apa yang menjadi tujuan bahwa partisipan setuju dan memahami apa yang menjadi tujuan bersama dan harus dicapai bersama. Sedangkan Emerson, Nabatchi dan Balogh mengungkapkan bahwa membangun kesepahaman bukan hanya ketika partisipan menyepakati nilai dan tujuan bersama, tetapi membangun kesepahaman juga merujuk pada kemampuan partisipan untuk memahami dan menghargai posisi dan kepentingan pihak lain ketika partisipan tersebut atau pihak lain tidak setuju.

Menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh legitimasi internal merupakan konfirmasi dan validasi dari setiap partisipan bahwa setiap pihak yang bersangkutan dalam kolaborasi tersebut dapat dipercayai, kredibel, dengan kepentingan yang relative sama dan saling bergantung, melegitimasi dan memotivasi untuk kolaborasi yang berkelanjutan. Legitimasi ini merupakan hasil dari kesepahaman antara partisipan. Kemudian menurut Ansell dan Gash komitmen merupakan faktor paling penting dalam proses kolaborasi. Komitmen pada proses juga berarti keyakinan bahwa kesepakatan dengan itikad yang baik untuk keuntungan bersama merupakan cara terbaik untuk mencapai hasil kebijakan yang diinginkan.

1.6.2. Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu kebutuhan manusia dengan tujuan melakukan wisata untuk dapat melepaskan penat, lelah dan menghilangkan stress,

serta melupakan masalah yang dialami oleh seseorang maupun kelompok baik di rumah maupun di kantor. Istilah pariwisata pertama kali muncul di masyarakat pada abad ke-18, khususnya setelah revolusi industri di Inggris. Pariwisata berasal dari dilakukannya kegiatan wisata (*tour*), yaitu suatu aktivitas perubahan tempat tinggal sementara dari seseorang maupun kelompok diluar tempat tinggal sehari-hari dengan tujuan untuk bersenang-senang. Sementara menurut Gusti Bagus dalam buku *Pengantar Industri Pariwisata* mengatakan pariwisata dapat dikelompokkan menjadi tujuh, yakni :

- a. Jasa Akomodasi yakni industri yang meliputi jasa hotel, pusat liburan, jasa mebel, untuk akomodasi, jasa training anak-anak, pelayanan kemping, dan pelayanan sejenis.
- b. Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman tercakup ke dalam industri ini adalah restaurant, rumah makan, kedai nasi, kedai kopi, kafe, pelayanan katering, dan pelayanan dalam menyiapkan makanan dan minuman bagi wisatawan.
- c. Jasa Transportasi Wisata termasuk kelompok ini adalah jasa angkutan darat seperti bus, kereta api, taxi, rental mobil. Selanjutnya jasa angkutan perairan seperti fast boat, kapal ferry, dan sejenisnya. Terakhir yaitu jasa angkutan udara seperti pesawat dan helicopter.
- d. Jasa Pemanduan dan Biro Perjalanan Wisata yang tercakup adalah agen perjalanan wisata, konsultan perjalanan, biro perjalanan, pemandu perjalanan dan sejenis lainnya.

- e. Jasa Pagelaran Budaya merupakan melayani fasilitas pelayanan tari, biro pelayanan penari, jasa pelayanan museum bersejarah, dan pelayan cagar alam.
- f. Jasa Rekreasi dan Hiburan termasuk kedalam kelompok ini adalah pelayanan olahraga, pelayanan golf course, surfing, sirkuit balapan, taman rekreasi dan pelayanan pantai, dan pelayanan pameran.
- g. Jasa Keuangan Pariwisata termasuk dalam kelompok ini adalah jasa keuangan, asuransi, dan jasa penukaran uang (Utama, I. G. B. R., & SE, 2015).

Definisi pariwisata menurut J. Christopher Holloway pariwisata adalah kepergian orang-orang dalam jangka waktu sementara ke tempat-tempat tujuan diluar rumah dan bekerja sehari-hari juga kegiatan-kegiatan selama mereka berada di tempat-tempat tujuan (Pitana, 2019). Kemudian Oka A. Yoeti mengemukakan pariwisata sebagai suatu perjalanan yang di lakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha (bussines) atau mencari nafkah ditempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam (Oka, 1994)

“Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwaisataan memberikan definisi mengenai wisata dan daya Tarik wisata, wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang dengan mengunjungitempat tertentu untuk tujuan reaksi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya Tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu

sementara. Kemudian dalam pengertian daya Tarik wisata adalah segala suatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan”. Menurut James Spillane dalam buku *Pariwisata Indonesia dan Perkembangannya* mengatakan obyek wisata harus memiliki beberapa unsur penting agar wisatawan dapat merasa puas dalam menikmati perjalanan, diantaranya :

1. Fasilitas cenderung mendukung dan berkembang saat yang sama.
2. Infrastruktur termasuk semua konstruksi dibawah dan diatas tanah dalam suatu wilayah atau daerah
3. Transportasi merupakan sarana yang dipergunakan untuk mencapai lokasi tujuan wisata
4. Keramah-tamaan, wisatawan yang sedang berada dalam lingkungan wisata maka kepastian akan jaminan keramah-tamaan penting khususnya wisatawan asing (Simanjuntak, Tanjung, & Nasution, 2017)

Pengelolaan pariwisata salah satu sektor yang dapat memberikan keuntungan secara ekonomi dan juga memiliki kekuatan sinergitas yang berkaitan erat dengan berbagai bidang dan sektor lainnya (Abidjulu, 2015). Dalam pengelolaan pariwisata tidak hanya berpatokan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah, tetapi juga pada pelestarian lingkungan hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan pariwisata disuatu obyek wisata harus berlandaskan pada perencanaan, pengembangan, dan arah pengelolaan yang jelas agar semua potensi

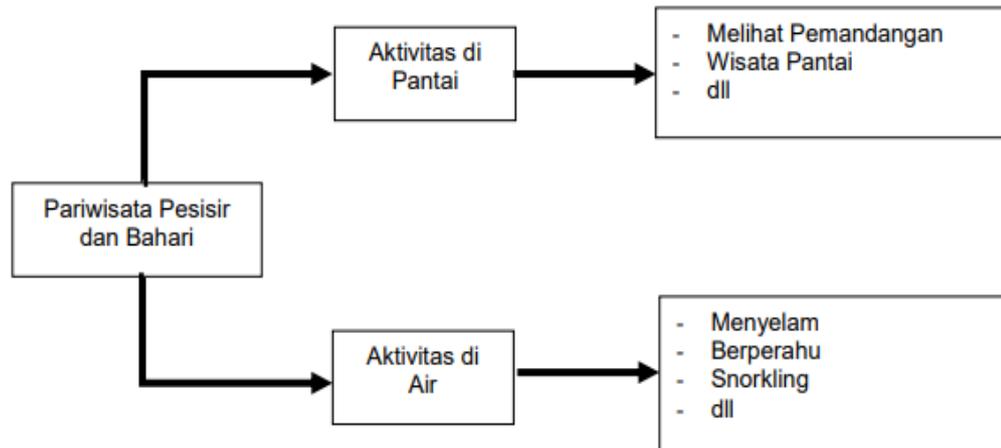
yang dimiliki suatu daerah tujuan wisata dapat di kelola secara baik dan optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sayogi & Dermatoto, 2009).

Berdasarkan beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Pariwisata juga salah satu jenis industri yang dianggap mampu untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya.

1.6.3. Wisata Bahari

Wisata Bahari adalah seluruh kegiatan yang bersifat rekreasi yang aktivitasnya dilakukan pada meida kelautan atau bahari dan meilputi daerah pantai, pulau-pulau sekitarnya, serta kawasan lautan dalam pengertian permukaannya, dalamnya, ataupun pada dasarnya termasuk taman laut (Rif'an, 2018). Kegiatan wisata bahari pada dasarnya mengundang tantangan, keberanian, ketenangan, historis dan terkhususnya melestariakan alam lingkungan dan biodata laut. Pada umumnya taman wisata bahari berlokasi pada tempat yang memiliki lingkungan yang alami, sejuk, dan sehat sehingga dapat mencapai suatu kegiatan rekreasi yang baik. Pariwisata pesisir adalah kegiatan rekreasi yang dilaksanakan disekitar pantai, seperti berenang, berselancar, berejemur, berdayung, menyelam, snorkeling, bersantai dan menikmati panorama pantai (Effendy, 2009).

Gambar 1. 4 Kerangka Pariwisata Pesisir dan Bahari



Sumber : Hall, 2001

Hall, 2001 menyatakan bahwa konsep pariwisata pesisir (*coastal tourism*) merupakan hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas wisata dan melakukan rekreasi di wilayah pesisir dan perairan (James, 2001). Sementara itu Orams, 1999 menjelaskan pariwisata bahari (*marine tourism*) sebagai kegiatan rekreasi yang meliputi perjalanan dari satu lokasi ke lokasi lainnya dan fokus pada lingkungan pesisir (Orams, 1999). Wisata bahari juga merupakan pengembangan dari kegiatan wisata bahari yang menjual daya Tarik alami yang ada di suatu wilayah pesisir dan lautan baik secara langsung atau tidak langsung. Konsep wisata bahari sangat menghargai potensi sumber daya lokal dan mencegah terjadinya perubahan dalam kepemilikan wilayah, tatanan sosial, serta budaya dalam masyarakat yang sangat berkontribusi sebagai pelaku dan juga penerima manfaat secara langsung dan juga mendukung berkembangnya kondisi ekonomi secara berkelanjutan, sehingga menciptakan lapangan kerja yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 1. 5 Zona Kawasan Wisata Bahari

KAWASAN (ZONA WISATA)	ATRAKSI	AKTIVITAS	FASILITAS		PRODUK WISATA
			UMUM	KHUSUS	
PESISIR (COASTAL)	1. Tradisi/pola hidup Desa Pesisir/ Nelayan 2. Berenang laut 3. Pantai/pasir 4. Budidaya 5. Hutan Bakau	1. Berenang 2. Berjemur 3. Silang budaya 4. Mangrove eksplorasi 5. Riset 6. Aktivitas pantai lainnya	1. <i>First Aid</i> 2. TIC 3. <i>Coast guard</i> 4. <i>Toilets</i> 5. Dan lain- lain	1. Difabilitas 2. Lansia 3. Anak-anak	1. Budaya 2. Olah Raga pantai 3. Hiburan 4. Kesehatan 5. Ekowisata
PERMUKAAN LAUT (MARINE)	1. Ombak 2. Angin 3. Terumbu 4. Padang lamun	1. Selancar 2. Berlayar 3. Mancing 4. Ski/Jetski 5. Paragliding 6. <i>Snorkling</i> 7. <i>Submersible</i> 8. Dan lain-lain	1. <i>First Aid</i> 2. TIC 3. <i>Coast guard</i> 4. <i>Toilets</i> 5. Marina 6. Dan lain- lain	1. Difabilitas 2. Lansia 3. Anak-anak	1. Olahraga 2. Hiburan 3. Petualangan 4. Ekowisata
BAWAH LAUT (SUBMARINE)	1. Flora Fauna laut a. Coral b. Padang lamun c. Binatang laut 2. Tinggalan budaya a. Kota b. Dermaga c. Kapal karam 3. Gejala alam	1. <i>Fun Dive</i> 2. <i>Diving</i> 3. <i>Research dive</i> 4. <i>Underwater</i> <i>Archaeology</i> 5. Riset 6. Dan lain-lain	1. <i>First Aid</i> 2. TIC 3. <i>Dive centre</i> 4. <i>Toilets</i> 5. Rumah sakit 6. <i>Dive</i> <i>Instructure</i> 7. Peralatan Selam 8. Dan lain- lain	1. Profesional 2. Amatir 3. Pemula	1. Budaya 2. Olah Raga 3. Selam 4. Petualangan 5. Ekowisata

Sumber : Kementerian Kelautan & Perikanan, 2018

Kemudian dalam hal mendukung daya wisata bahari adalah menargetkan jumlah wisatawan yang dapat menggunakan suatu kawasan tanpa mengganggu lingkungan fisik dan menurunkan kualitas spiritual yang diperoleh pengunjung dan tidak merugikan dari sisi ekonomi, ekologi, dan sosial (Rahmatika, Kusumastanto, & Sadelie, 2017). Maka melihat kegiatan dalam menunjang wisata bahari harus memiliki beberapa fasilitas, yaitu dermaga, kafe atau club, akuarium laut, kolam renang, area taman anak-anak, area berjemur, berkemah, panggung terbuka, akomodasi penginapan, restaurant, dan pasar seni. Disamping itu tujuan dari wisata bahari adalah untuk mengajak masyarakat agar lebih menjaga dan mencintai keindahan laut baik dari pesisir pantai maupun dasar laut serta lingkungan disekitarnya. Pelaksanaan pengembangan wisata bahari juga didukung oleh para

aktor pemerintah, akaedimis, masyarakat, dan pihak swasta dalam mengelola program wisata bahari dilapangan. Sehingga pengembangan ini dilakukan dengan tepat untuk memenuhi kegiatan rekreasi wisata bahari dengan berkualitas (Nurasmah, 2015).

1.7. Definisi Konseptual

1.7.1. Collaborative Governance

Collaborative governance merupakan suatu pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga-lembaga publik bersama dengan stakeholder yang berkaitan langsung dalam proses pengambilan keputusan secara bersama yang bersifat formal, berorientasi consensus, dan musyawarah dengan tujuan membuat atau melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program asset public (Ansell & Gash, 2007). Sedangkan instrumen yang digunakan untuk mengatasi suatu masalah, *collaborative governance* adalah kondisi yang dimana pemerintah untuk memenuhi tujuan public melalui kolaborasi antar kelompok maupun seseorang (Richard J. Zeckhauser, n.d.).

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa *Collaborative governance* adalah suatu hubungan kerjasama yang dilakukan oleh beberapa stakeholder yang berkaitan untuk mencapai suatu yang diinginkan. Kemudian stakeholder tersebut bekerjasama dalam mencari solusi suatu permasalahan, sehingga masalah dapat teratasi dengan baik dengan adanya kerjasama yang baik.

1.7.2. Pariwisata

Pariwisata merupakan sebagai suatu perjalanan yang di lakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha (bussines) atau mencari nafkah ditempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam (Oka, 1994). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Pariwisata juga salah satu jenis industri yang dianggap mampu untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya.

1.7.3. Wisata Bahari

Wisata Bahari adalah seluruh kegiatan yang bersifat rekreasi yang aktivitasnya dilakukan pada meida kelautan atau bahari dan meilputi daerah pantai, pulau-pulau sekitarnya, serta kawasan lautan dalam pengertian permukaannya, dalamnya, ataupun pada dasarnya termasuk taman laut (Rif'an, 2018). Kegiatan wisata bahari pada dasarnya mengundang tantangan, keberanian, ketenangan, historis dan terkhususnya melestariakan alam lingkungan dan biodata laut. Pada umumnya taman wisata bahari berlokasi pada tempat yang memiliki lingkungan yang alami, sejuk, dan sehat sehingga dapat mencapai suatu kegiatan rekreasi yang baik. Pariwisata pesisir adalah kegiatan rekreasi yang dilaksanakan disekitar pantai,

seperti berenang, berselancar, berejemur, berdayung, menyelam, snorkeling, bersantai dan menikmati panorama pantai (Effendy, 2009).

Maka dapat disimpulkan dari pengertian diatas wisata bahari adalah wisata yang berlokasi dipantai maupun dipulau-pulau yang menyediakan fasilitas dermaga, kafe atau club, akuarium laut, kolam renang, area taman anak-anak, area berjemur, berkemah, panggung terbuka, akomodasi penginapan, restaurant, dan pasar seni. Selain itu kawasan wisata bahari meliputi pesisir, permukaan laut dan bawah laut untuk wisatawan yang berkunjung atau berdestinasi ketempat tersebut.

1.8. Definisi Operasional

Penelitian ini akan menjelaskan dalam beberapa bentuk indikator tentang kolaborasi pemerintah berdasarkan teori-teori diatas, maka hal ini melihat bagaimana peran masing-masing stakeholder beserta proses *collaborative governance* dalam pengelolaan wisata bahari wilayah Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika di kabupaten Lombok Tengah tahun 2020.

A. Untuk mengetahui proses kolaborasi hasil modifikasi dan elaborasi pendapat

Ansell & Gash dan Emerson, Nabatchi & Balogh, yaitu :

1. Dialog/Komunikasi
 - a. Proses awal mula komunikasi
 - b. Respon awal masing-masing stakeholder ketika memulai komunikasi
2. Membangun Kepercayaan dan Kesepahaman
 - a. Tanggapan masing-masing stakeholder
 - b. Langkah-langkah yang dilakukan
3. Legitimasi Internal

- a. Bentuk kerjasama yang dibangun
- b. Aturan-aturan yang dibuat
- 4. Komitmen
 - a. Bentuk keseriusan masing-masing stakeholder
 - b. Rencana program yang dibuat untuk menjalankan kesepakatan
- B. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam pengembangan obyek wisata bahari Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif. Bodyan dan Taylor menyatakan bahwa metode kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Melalui metode kualitatif peneliti dapat menganalisa subyek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari (Lexy J. Moleong, 2009).

Alasan digunakan analisa kualitatif deskriptif adalah karena sesuai dengan judul dipaparkan yaitu *collaborative governance* dalam pengelolaan obyek wisata bahari kawasan ekonomi khusus mandalika di kabupaten Lombok Tengah. Peneliti mengumpulkan data-data dan fakta-fakta yang ada untuk kemudian ditafsirkan secara deskriptif sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dan indikator yang diteliti terkait Kolaborasi.

1.9.2. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di kabupaten Lombok Tengah, provinsi Nusa Tenggara Barat tepatnya adalah wisata bahari Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika dan institusi yang berkaitan untuk menghimpun data terkait *collaborative governance* dalam pengelolaan obyek wisata bahari kawasan ekonomi khusus mandalika.

1.9.3. Unit Analisis

Sesuai dengan inti permasalahan yang ada pada pokok pembahasan masalah dalam penelitian ini, maka unit analisa pada penelitian ini adalah *collaborative governance* dalam pengelolaan obyek wisata bahari kawasan ekonomi khusus mandalika di kabupaten Lombok Tengah.

1.9.4. Sumber Data

Penelitian kualitatif menggunakan data berupa teks, kata-kata tulisan, frasa-frasa atau symbol yang menggambarkan atau merepresentasikan orang-orang, tindakan-tindakan dan peristiwa dalam kehidupan sosial. Karena yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif yang dibutuhkan adalah sumber data primer dan data skunder.

1.9.5. Jenis Data

A. Data Primer

Data langsung dari responden untuk memperoleh keterangan yang dengan penelitian melalui wawancara kepada beberapa anggota pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat yang ikut terlibat dalam pengelolaan obyek wisata bahari kawasan ekonomi mandalika. Data primer yang akan diambil berupa:

- 1) Data program-program yang dibuat oleh masing-masing stakeholder
- 2) Data jumlah kerjasama yang telah dibangun melalui program pengelolaan KEK Mandalika

B. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari bahan-bahan dokumen dan literature-literature yang ada dalam objek penelitian. Data sekunder guna mendukung penelitian ini didapat melalui data yang tersedia di website kawasan ekonomi khusus mandalika, jurnal, artikel, dan surat kabar.

- 1) Data program-program yang dibuat oleh pengembang untuk mensukseskan program KEK Mandalika
- 2) MoU antara stakeholder yang bersangkutan.

1.9.6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun beberapa teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Studi kepustakaan

Digunakan dalam penelitian ini untuk menggali data sekunder mengenai beberapa hal, yaitu mengenai pengelolaan KEK Mandalika. Adapun sumbernya adalah dari berbagai buku teks, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian sebelumnya, informasi media massa, dan berbagai dokumen lain yang relevan. Seperti yang telah dituliskan pada sumber data yang diatas, data-data yang akan dikumpulkan dalam studi kepustakaan ini yaitu:

- 1) Program-program yang telah dibuat oleh pemerintah, program-program yang dibuat oleh pengembang, dan stakeholder lainnya.

2) Dokumen kerjasama yang dibuat

b. Observasi

Observasi merupakan proses dimana peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Teknik ini penting dilakukan dalam penelitian ini karena untuk mengamati proses kolaborasi dan peran masing-masing stakeholder dalam pengelolaan program KEK Mandalika. Hasil observasi diharapkan dapat membantu dalam memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai kolaborasi KEK Mandalika.

c. Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik yang digunakan untuk menggali data primer dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan ketika melakukan penelitian dilapangan dengan pihak-pihak yang terlibat dan paling mengetahui mengenai proses dan dinamika kolaborasi dalam pengelolaan program KEK Mandalika.

1.9.7. Teknik Analisa Data

Cara menganalisa data dalam penelitian ini dengan menyusun menggunakan analisa deskriptif diperoleh dari diklasifikasikan, dijabarkan dengan bentuk kata-kata atau kalimat. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi tentang kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut yang diperoleh dari naskah wawancara dan analisis isi. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa deskriptif atau bisa disebut triangulasi sumber, menjelaskan fenomena secara singkat dengan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

a. Reduksi data

Merupakan data proses pemilihan yang diperoleh dengan cara mentransformasikan data mentah atau data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

b. Penyajian data

Merupakan penyajian data yang berguna untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari peneliti. Batasan yang diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan sebuah kesimpulan dan pengambilan tindakan. Peneliti juga melakukan penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan dilakukandengan teks naratif, foto dan gambar sejenisnya.

c. Kesimpulan

Tahapan akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan data-data yang telah diperoleh dari observasi, interview dan analisis isi.